

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Istilah triumvirat di tahun 2000-an menjadi bahan perdebatan. Istilah “lama” ini muncul kembali karena dalam RUU tentang Kepresidenan yang akan diajukan DPR sebentar lagi, antara lain, ditetapkan jika presiden dan wapres berhalangan tetap, maka Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua MA berhak menjalankan jabatan kepresidenan.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, triumvirat diartikan sebagai tritunggal, tiga serangkai; dan pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang tiga orang sebagai suatu kesatuan. Dalam realita praktek politik di Indonesia, kedua pengertian itu dapat digunakan untuk mengartikan istilah triumvirat.²

Secara historis, istilah itu pertama kali muncul di berbagai surat kabar di Tanah Air pada masa-masa awal kelahiran Orde Baru, tepatnya antara Maret – Juni 1966, ketika Supersemar mulai difungsikan secara politik. Kesan yang muncul dari pemberitaan itu, antara lain, adanya semacam opini publik dalam negeri yang menginginkan adanya semacam kepemimpinan kolektif dalam bentuk kerja sama tim yang dapat merebut dukungan luas dari masyarakat di dalam negeri untuk menjadi

¹ Satya Arinanto Staf pengajar Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Majalah PANJI MASYARAKAT, No. 46 tahun III, 8 Maret 2000.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 1211.

semacam kekuatan penyeimbang terhadap kekuasaan Bung Karno yang sangat besar, yang saat itu secara riil posisinya makin lemah.

Kepemimpinan kolektif yang diandalkan saat itu terdiri atas, *Pertama*, Soeharto sebagai pemegang Supersemar, yang kekuasaannya sebagai penerima “Dokumen Sakti” kemudian memperoleh basis legitimasi dalam berbagai Tap MPRS. *Kedua*, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang diberi mandat memecahkan masalah rehabilitasi dan stabilisasi perekonomian nasional. Dan *Ketiga*, Adam Malik, yang ditugasi memulihkan kepercayaan internasional bahwa Indonesia tidak akan menjadi faktor instabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Bagaimanapun, hasil kerja triumvirat saat itu dapat dikatakan berhasil memulihkan citra Indonesia sebagai negara yang cinta damai dan stabil di Asia Tenggara. Kerja Triumvirat juga menghapus citra negatif tentang Indonesia sebagai negara revolusioner dan ekspansif (sangat berhasil). Jadi, inilah pengertian triumvirat yang pertama kali muncul dan dikenal dalam politik dan tatanegara Indonesia.

Pemahaman kedua soal triumvirat muncul setelah Sidang Paripurna ke-5 MPR tahun 1973 (22 Maret 1973), yang menetapkan berlakunya Tap. MPR No. VII/MPR/1973 tentang “Keadaan presiden atau wapres berhalangan”. Di dalam Tap. MPR tersebut antara lain ditetapkan, bahwa sejak presiden dan wapres berhalangan tetap, maka Mendagri, Menlu, dan Menhankam bersama-sama melaksanakan “jabatan pemangku sementara jabatan presiden”. Mereka melaksanakan pekerjaan sehari-hari

presiden sampai presiden dan wapres definitif yang dipilih MPR memegang jabatannya. Ketiga menteri itulah yang kemudian dikenal dengan istilah triumvirat yang kedua.

Dalam kaitan itu ditegaskan, dalam waktu satu bulan setelah presiden dan wapres berhalangan tetap, MPR harus sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk memilih dan mengangkat presiden dan wapres, yang masa jabatannya berakhir sesuai masa jabatan presiden dan wapres yang digantikannya. Jadi, triumvirat itu hanya berkuasa selama maksimal satu bulan, terhitung sejak presiden dan wapres berhalangan tetap.

Triumvirat versi kedua ini pernah diusulkan untuk diaktifkan saat Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, dan B. J. Habibie sebagai penggantinya dinilai hanya sebagai semacam “pemerintahan transisi”. Hanya saat itu banyak pihak tidak setuju, mengingat begitu *powerfull*-nya Menhankam (Wiranto) dan Mendagri (Syarwan Hamid) yang menjabat saat itu, yang setidaknya-tidaknya jauh lebih kuat daripada Menlu (Ali Alatas) saat itu. Jadi, ada anggapan, pemberlakuan konsep triumvirat saat itu akan melegitimasi supremasi militer dan sipil. Namun, sejak diberlakukannya triumvirat versi kedua ini belum pernah diterapkan di Indonesia.

Sementara triumvirat versi ketiga muncul dalam RUU Kepresidenan, yang mengalihkan fungsi triumvirat kepada Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua MA. Namun, konsep RUU itu tidak mempergunakan konsep triumvirat sepenuhnya karena lebih bersifat suksesi. Misalnya, jika presiden dan wapres berhalangan tetap, ketua MPR

Negara. Selanjutnya, secara keseluruhan departemen dibentuk dalam susunan sebuah Kabinet Pemerintahan. Jumlah departemen yang disusun oleh presiden haruslah disesuaikan dengan program yang ada dalam kabinet. Setiap departemen yang terbentuk dikepalai oleh seorang menteri.

Sedangkan dalam pandangan Islam, kementerian adalah jabatan nomor dua setelah imam. Jabatan itu dapat diperoleh oleh seorang menteri setelah mendapatkan legitimasi dari seorang imam melalui proses perwalian atau pelimpahan tugas.

Dari sini dapat kita asumsikan bahwasannya antara kedudukan kementerian menurut ketatanegaraan di Indonesia tidak sama dengan kedudukan kementerian dalam perspektif *Fiqih Siyāsah*. Oleh karena itu, penulis akan meneliti bagaimana kedudukan kementerian triumvirat dalam perspektif UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan dalam pandangan *Fiqih Siyāsah*.

Dalam buku yang berjudul “*Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen & Lembaga Pemerintah Non Departemen Kabinet Gotong-Royong*” Pengarang Cipta Jaya, Penerbit Cipta Karya, Tahun Terbit 2000. yang berisi tentang Keputusan Presiden RI No. 102 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen; Kepres No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. PP. RI No. 63 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan

Menteri Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Urusan Milik Negara.

Sedangkan dalam buku "*Menteri Mundur? No Way*", karya Prof. Dr. Samsul Wahidin SH. MH., Guru Besar Hukum Tata Negara Unmer Malang menjelaskan tentang hak prerogatif presiden terhadap kedudukan seorang menteri. UUD 1945 yang belum diamandemen secara tegas menetapkan bahwa menteri negara adalah pembantu presiden yang kedudukannya bergantung sepenuhnya kepada presiden. Menteri adalah kepala departemen yang bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala eksekutif.

Pada buku *Memformat Kementerian Negara* diterangkan bagaimana memilih menteri yang benar-benar pada posisi dan kedudukannya. Idealnya, sebelum pemilihan presiden yang baru, sudah ditetapkan UU Kementerian Negara sebagai pedoman presiden dalam mengisikan jajaran kementeriannya. Tentu saja yang terpenting UU tersebut tidak boleh menabrak hak prerogatif presiden, sekaligus dapat mengeliminasi kepentingan politik dari jabatan menteri serta terjaganya akuntabilitas dan transparansinya kepada publik. Dengan demikian, siapa pun menterinya dan apa pun posisinya, mereka haruslah putra-putri terbaik bangsa ini untuk kemajuan bangsa bersama-sama, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, partai, dan aksesori primordial lainnya. Penulis, dosen Ilmu Politik dan Direktur pada Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia, serta Tim Pakar Perumus Telstranas 2010-2011.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *WIZĀRAH*

A. Pengertian *Wizārah*

Kata *Wizārah* diambil dari kata *al-Wāzir*, yang berarti *al-Ṣuql* yang berarti berat. Hal ini dikatakan demikian, karena seorang *Wāzir* memikul beban tugas kenegaraan yang sangat berat, dan kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan serta pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *Wāzir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam suatu pemerintahan. Dalam *First Encyclopedia Of Islam*, kata *wizārah* atau *Wāzir* diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Anesta*, *Wāzir* berasal dari kata *Vicira*, yang berarti orang yang memutuskan atau disebut dengan hakim¹. Maka *Wāzir* adalah nama kementerian dalam sebuah negara dan kerajaan. Karena pejabat yang mengepalai berwenang memutus suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.² Sedangkan dalam kamus bahasa Arab, *Wizārah* diartikan dengan kementerian negara yang tugasnya membantu kepala negara dalam menjalankan pemerintahan.³

¹ Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1992), 502

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 2001), 144

³ *Ibid.*, 88

Dengan demikian dapat ditarik suatu hukum, yaitu mubah atau boleh dalam pengangkatan seorang pembantu atau *wāzīr*, dengan beberapa alasan serta fakta yang ada atau sudah dijelaskan di atas.



D. Kedudukan, Fungsi dan wewenang *Wāzīr*

Dalam bukunya Teungku Muhammad membahas tentang kedudukan, fungsi dan wewenang masing-masing *wāzīr* sesuai dengan wilayah masing-masing dalam membantu tugas kepala negara.

Dengan melihat penjelasan *wizārah tafwīd* di atas, maka dapat kita fahami bahwa kedudukan *wāzīr tafwīd* adalah sebagai pembantu kepala negara yang memiliki otoritas penuh dari kepala negara dan dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Peranannya terlihat lebih dominan dibanding dengan apa yang dikerjakan oleh kepala negara.⁴⁵

Sedangkan dalam bukunya Abdul Qodim Zallum menjelaskan tugas-tugas *wāzīr* terlebih dahulu, karena fungsi *wāzīr* akan dapat diketahui apabila kita mengetahui tugas-tugas yang dilakukan oleh *wāzīr*. Tugas *wāzīr tafwīd* adalah menyampaikan kepada *khālifah* apa yang menjadi rencananya dalam mengatur urusan pemerintahan dan melaporkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengurus pemerintahan tersebut kepada kepala negara.⁴⁶ Dari sini dapat kita lihat

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Politik, disadur oleh Dhiyauddin ar-Rayis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. I, 2002), 116

⁴⁶ Abdul Qodim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam, Terj. M. Magfur W*, (Bangil, Jatim: Al-Izza, Cet. III, 2003), 162

menginginkan adanya semacam kepemimpinan kolektif dalam bentuk kerja sama tim yang dapat merebut dukungan luas dari masyarakat di dalam negeri untuk menjadi semacam kekuatan penyeimbang terhadap kekuasaan Bung Karno yang sangat besar, yang saat itu secara riil posisinya makin lemah.

Kepemimpinan kolektif yang diandalkan saat itu terdiri atas, *Pertama*, Soeharto sebagai pemegang Supersemar, yang kekuasaannya sebagai penerima “Dokumen Sakti” kemudian memperoleh basis pengakuan dalam berbagai Tap MPRS. *Kedua*, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang diberi tugas memecahkan masalah pemulihan dan keseimbangan perekonomian nasional. Dan *Ketiga*, Adam Malik, yang ditugasi memulihkan kepercayaan internasional bahwa Indonesia tidak akan menjadi faktor instabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Bagaimanapun, hasil kerja Menteri Triumvirat saat itu dapat dikatakan berhasil memulihkan citra Indonesia sebagai negara yang cinta damai dan stabil di Asia Tenggara. Kerja Menteri Triumvirat juga menghapus citra negatif tentang Indonesia sebagai Negara Revolusioner dan Ekspansif. Jadi, inilah pengertian triumvirat yang pertama kali muncul dan dikenal dalam politik dan Tatanegara Indonesia.

Pemahaman kedua soal triumvirat muncul setelah Sidang Paripurna ke-5 MPR tahun 1973 (22 Maret 1973), yang menetapkan berlakunya Tap. MPR No. VII/MPR/1973 tentang “Keadaan Presiden atau Wakil Presiden Berhalangan”. Di dalam Tap. MPR tersebut antara lain ditetapkan, bahwa sejak presiden dan wakil

presiden berhalangan tetap, maka Mendagri, Menlu, dan Menhankam bersama-sama melaksanakan “jabatan pemangku sementara jabatan presiden”. Mereka melaksanakan pekerjaan sehari-hari presiden sampai presiden dan wakil presiden yang tetap atau asli yang dipilih MPR memegang jabatannya. Ketiga Menteri itulah yang kemudian dikenal dengan istilah triumvirat yang kedua.

Dalam kaitan itu ditegaskan, dalam waktu satu bulan setelah presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, MPR harus sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa³ untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai masa jabatan presiden dan wakil presiden yang digantikannya. Jadi, triumvirat itu hanya berkuasa selama maksimal satu bulan, terhitung sejak presiden dan wakil presiden berhalangan tetap.

Triumvirat versi kedua ini pernah diusulkan untuk diaktifkan saat presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, dan B. J. Habibie sebagai penggantinya dinilai hanya sebagai semacam “Pemerintahan Transisi”. Hanya saat itu banyak pihak tidak setuju, mengingat begitu berkuasanya Menhankam (Wiranto) dan Mendagri (Syarwan Hamid) yang menjabat saat itu, yang setidaknya jauh lebih kuat daripada Menlu (Ali Alatas) saat itu. Jadi, ada anggapan pemberlakuan konsep triumvirat saat itu akan melegitimasi supremasi militer dan

³ Sidang Istimewa adalah sidang yang diadakan pada waktu negara dalam keadaan tidak stabil atau dalam keadaan darurat. Sedangkan Sidang Paripurna adalah sidang yang diikuti oleh semua anggota atau lembaga, mulai MPR, DPR dan DPD.

kekuatan penyeimbang terhadap kekuasaan Bung Karno yang sangat besar, yang saat itu secara riil posisinya makin lemah.

Kepemimpinan kolektif yang diandalkan saat itu terdiri atas, *Pertama*, Soeharto sebagai pemegang Supersemar, yang kekuasaannya sebagai penerima “Dokumen Sakti” kemudian memperoleh basis legitimasi dalam berbagai Tap. MPRS. *Kedua*, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang diberi mandat memecahkan masalah rehabilitasi dan stabilisasi perekonomian nasional. Dan *Ketiga*, Adam Malik, yang ditugasi memulihkan kepercayaan internasional bahwa Indonesia tidak akan menjadi faktor instabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Hasil kerja triumvirat saat itu dapat dikatakan berhasil memulihkan citra Indonesia sebagai negara yang cinta damai dan stabil di Asia Tenggara. Kerja Triumvirat juga menghapus citra negatif tentang Indonesia sebagai negara revolusioner dan ekspansif (sangat berhasil). Jadi, inilah pengertian triumvirat yang pertama kali muncul dan dikenal dalam politik dan tatanegara Indonesia.

Pemahaman kedua soal triumvirat muncul setelah Sidang Paripurna ke-5 MPR tahun 1973 (22 Maret 1973), yang menetapkan berlakunya Tap. MPR No. VII/MPR/1973 tentang “Keadaan presiden atau wapres berhalangan”. Di dalam Tap. MPR tersebut antara lain ditetapkan, bahwa sejak presiden dan wapres berhalangan tetap, maka Mendagri, Menlu, dan Menhankam bersama-sama melaksanakan “jabatan pemangku sementara jabatan presiden”. Mereka melaksanakan pekerjaan sehari-hari presiden sampai presiden dan wapres definitif yang dipilih MPR

memegang jabatannya. Ketiga menteri itulah yang kemudian dikenal dengan istilah triumvirat yang kedua.

Dalam kaitan itu ditegaskan, dalam waktu satu bulan setelah presiden dan wapres berhalangan tetap, MPR harus sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk memilih dan mengangkat presiden dan wapres, yang masa jabatannya berakhir sesuai masa jabatan presiden dan wapres yang digantikannya. Jadi, triumvirat itu hanya berkuasa selama maksimal satu bulan, terhitung sejak presiden dan wapres berhalangan tetap.

Triumvirat versi kedua ini pernah diusulkan untuk diaktifkan saat Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, dan B. J. Habibie sebagai penggantinya dinilai hanya sebagai semacam “pemerintahan transisi”. Hanya saat itu banyak pihak tidak setuju, mengingat begitu *powerfull*-nya Menhankam (Wiranto) dan Mendagri (Syarwan Hamid) yang menjabat saat itu, yang setidaknya jauh lebih kuat daripada Menlu (Ali Alatas) saat itu. Jadi, ada anggapan, pemberlakuan konsep triumvirat saat itu akan melegitimasi supremasi militer dan sipil.

Sementara triumvirat versi ketiga muncul dalam RUU Kepresidenan, yang mengalihkan fungsi triumvirat kepada Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua MA. Namun, konsep RUU itu tidak mempergunakan konsep triumvirat sepenuhnya karena lebih bersifat suksesi. Misalnya, jika presiden dan wapres berhalangan tetap, ketua MPR menjalankan jabatan kepresidenan maksimal tiga bulan hingga

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan.

B. Analisis Terhadap Kekuasaan, Fungsi dan Kewenangan Kementerian Triumvirat di Indonesia.

Kementerian merupakan salah satu lembaga kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Dan orang-orang yang menjabat lembaga tersebut dinamakan menteri, peranan yang dilakukan oleh seorang menteri sangat menentukan gerak langkah kepala negara demi memajukan dan melaksanakan kesejahteraan rakyat yang dipimpinya, sebagai tangan kanan kepala negara, menteri menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama kepala negara, apalagi dengan bertambah rumitnya kehidupan social sekarang ini, maka peranan seorang menteri sangat dibutuhkan oleh kepala negara. Dan kepala negara juga mempunyai wewenang membentuk menteri sesuai dengan keperluan negara. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 telah disebutkan sebagai berikut”bahwa presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-menteri Negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan dan bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

membantu atau menjadi tangan kanan presiden dalam mengurus pemerintahan sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Menteri Negara pasal 5 ayat 1 adalah Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri serta Menteri Pertahanan dan Keamanan. Dalam konteks Indonesia *Qoḍo'*, *Mazalim*, *'Askar* sama dengan peradilan agama, negeri dan militer. Sedangkan *Kātib Kharaj*, *Baitul Mal dan Rasa'il* sama seperti lembaga perpajakan, pejabat keuangan dan menteri sekretaris negara atau asisten pribadi presiden. Tentang masalah pemimpin daerah ada *Imarah Istikhfa'*, *Istila'* dan *Khaṣṣah* dan tugasnya juga sudah jelas yaitu *Imarah Istikhfa'*, mengatur dan mengaji tentara, menegakkan hukum dan menjadi imam. *Imarah Istila'*, bertugas dalam bidang hukum dan politik semacam kepala kepolisian daerah (Polda) dan *Imarah Khaṣṣah* bertugas mengurus masalah ketentaraan.

Adapun wewenang yang dimiliki *wāzīr* adalah meliputi segala urusan kekuasaan pemerintahan dan pemerintahan pusat untuk seluruh daerah. Sedangkan di Indonesia setiap departemen dipimpin oleh seorang menteri, yang selanjutnya memiliki organisasi kepanjangan atau instansi vertikal mulai dari Pusat sampai ke Propinsi Daerah Tingkat I (disebut dengan Kantor Wilayah), Kabupaten Daerah Tingkat II (disebut dengan Kantor Departemen) bahkan juga Kecamatan, tergantung kebutuhan masing-masing departemen. Kemudian juga diadakan 3 Pejabat Tinggi Negara setingkat menteri. Masing-masing pejabat setingkat menteri tersebut di atas, yaitu: Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia dan Panglima Angkatan Bersenjata.

